

smar Ismail's

THE BIG VILLAGE



Deeper Dive

Jakarta 500 Tahun: Rimpang Kampung Kota

Hikmat Darmawan

Tentang Penulis



Hikmat Darmawan merupakan seorang kritikus, kurator dan peneliti di bidang budaya populer, terkhusus komik, film, dan sastra. Ia telah menulis tentang budaya sejak 1990-an di berbagai media nasional, termasuk *Tempo*, *Kompas*, dan *Republika*. Ia juga mendirikan sejumlah komunitas dan platform daring seperti milis budaya *Musyawah Burung* dan situs kritik *rumahfilm.org* yang aktif sejak awal tahun 2000-an hingga 2012.

Pada 2010, ia terpilih menjadi salah satu penerima program Asian Public Intellectuals (API) Nippon Foundation untuk meneliti globalisasi subkultur manga di Jepang, Thailand, dan Indonesia selama setahun. Sebagian aspek penelitiannya telah diterbitkan dalam buku berjudul *Sebulan di*

Negeri Manga (Gramedia, 2019). Hikmat juga merupakan salah satu pendiri Pabrikultur, yang bersama Mizan Group menginisiasi Festival Film Internasional Madani. Bersama Manufacturing, Hikmat pernah mengkurasi dan menyelenggarakan pameran komik di Frankfurt Book Fair 2015, Europalia Indonesia-Belgia 2017, dan London Book Fair 2019. Pada tahun 2015 hingga 2023, Hikmat menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Kesenian Jakarta, sekaligus anggota Komite Film.



Menelisik Pertumbuhan Kampung Kota

Kampung kota adalah sebuah medan budaya paling dinamis di Jakarta. Tapi, kampung kota juga sering kali dipandang sebagai entitas dengan setumpuk masalah, liar, serta mudah—atau bahkan perlu—disingkirkan dalam kerapihan angan-angan menjadi kota metropolitan modern dan maju. Ternyata, di usia (politik) Jakarta ke-498, dua tahun sebelum lima abad kota ini, kampung kota bukanlah sesuatu yang mudah disingkirkan dalam kenyataan.

“Kampung kota” adalah sebuah kata yang menarik. Bisa saja kata ini diperlakukan sebagai oksimoron (dua kata bertentangan dan saling

membatalkan yang digabungkan). Saya lebih condong percaya bahwa kata ini merupakan sebuah dialektika. Kita bisa menelisik lebih dulu akar katanya, agar bisa mengulik potensi maknanya. “Kampung” dalam KBBI didefinisikan dalam beberapa pengertian, sebagian bersifat peyoratif (merendahkan). Ada tiga pengertian untuk kata “kampung” di KBBI daring. Tiga sebagai kata benda, dan satu sebagai adjektiva.

Pertama, “kampung” adalah “kelompok rumah yang merupakan bagian dari kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah)”. Pengertian kedua, memadankan dengan kata “desa” dan

“dusun”. Pengertian ketiga, “kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, di bawah kecamatan”. Pengertian keempat, kata sifat: “terkebelakang (belum modern); berkaitan dengan kebiasaan di kampung; kolot”. Pengertian terakhir tentu terkait sebuah umpatan populer, “kampungan”.

Pengertian keempat menampakkan konstruksi pikir yang mempertentangkan “kampung” dengan “modern” dan “maju”. Padahal, kita tahu, lawan kata dari “kampung” adalah “kota”, sebagaimana lawan kata “rural” adalah “urban”. Artinya, dalam konstruksi pikir yang menempatkan “kampung” sebagai “terkebelakang”, “kota” menjadi sesuatu yang identik dengan “modern” dan “kemajuan”. Dikaitkan dengan pengertian pertama, kampung “biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah”, maka kampung kota dipahami dalam konteks kelas ekonomi juga.

Dalam imaji visual di media populer 1970-an hingga kini, kampung kota sering tampak menjadi kontras problematik Jakarta. Sebuah “masalah” yang mengganggu imaji dan angan-angan kemajuan Jakarta. Labirin perumahan padat, gang-gang sempit, tata ruang semrawut, kotor, seakan jadi latar alamiah bagi kekerasan-kekerasan kota dalam aneka bentuk—entah berupa kebodohan, ketegangan emosional, kesenjangan ekonomi, dan kejahatan-kejahatan kriminal.

Imaji demikian mungkin telah terbangun sejak bacaan-bacaan modern masa kolonial dalam koran semasa, atau dalam novel-novel modern awal Hindia Belanda, seperti *Tjerita Njai Dasima* (G. Francis, 1896) dan *Tjerita Si Tjonat, Sato Kepala Penjamoen di Djaman Dahoele Kala* (F.D.J. Pangemanann, 1900). Kampung di Batavia adalah daerah rural gelap, dengan warga pribumi yang miskin dan berpendidikan rendah serta dekat dengan kekerasan dan kejahatan. Imaji ini bisa diteroka pada sejarah pertumbuhan kota Jakarta sejak masa kolonial.

Sebermula, kampung di Batavia adalah tempat kelompok penduduk khusus, entah penduduk asli atau migran, yang tak punya tempat dan uang sebanyak kaum elite Belanda, ningrat, dan pengusaha. Kaum *mardijkers* keturunan budak Asia dari masa Portugis, misalnya, antara lain berkumpul di Kampung Tugu. Para migran dari Melayu, di Kampung Melayu. Demikian juga penduduk Kampung Arab dan beberapa sebaran kelompok etnik Tionghoa jelata di daerah Senen, Kali Besar, dsb.

Kampung-kampung itu kebanyakan bersuasana rural, sering kali sekaligus area perkebunan atau pinggir kali yang rimbun seperti Ci Liwung dan Kali Pesanggrahan di bagian yang berada di luar wilayah kota Batavia. “Wilayah kota” pada masa itu



Source: Wikimedia Commons

merupakan perluasan daerah Pelabuhan dan benteng hingga abad ke-19. Sampai awal abad ke-20, profil kampung-kampung Batavia relatif sama. Pertumbuhan penduduk juga relatif landai, dari sekitar 300 ribuan penduduk pada 1815 (menurut *History of Java*), lalu pada 1935 masih di 435.184 jiwa.

Pada 1918, terjadi banjir besar di Batavia. Topografi dan kondisi geografis Batavia memang harus berkawan dengan banjir. Tapi, di awal abad ke-20, banjir menjadi bencana ketika mulai tumbuh daerah pemukiman masyarakat yang lebih padat sehingga dampak air naik itu lebih terasa bagi kehidupan penduduk. Mohammad Husni Thamrin mendesak pemerintah untuk memperbaiki kampung (*kampoeng verbetering*). Pada 1920-an, proses perbaikan kampung itu dimulai di Batavia, dan kemudian ditiru di kota-kota lain seperti Surabaya (yang hingga saat itu lebih besar dari Jakarta), Makassar, Kendari, dan Solo.

Walau begitu, kaum migran tetap meneruskan sifat swadaya dalam membangun perumahan di lahan-lahan lebih murah dari kawasan kaum elite di Utara dan Pusat Batavia. Artinya, tata ruangnya bersifat lebih cair, spontan, dan bahkan tidak permanen. Di sisi lain, tata hidup warga lebih dekat satu sama lain—lebih guyub—karena hidup saling menempel dalam rumah-rumah tak berpagar dan dinding lebih tipis, sering kali bilik bambu. Watak swadaya, cair, dan tidak permanen dari kampung kota itu semakin kuat ketika terjadi lonjakan jumlah penduduk Batavia sesudah era Revolusi



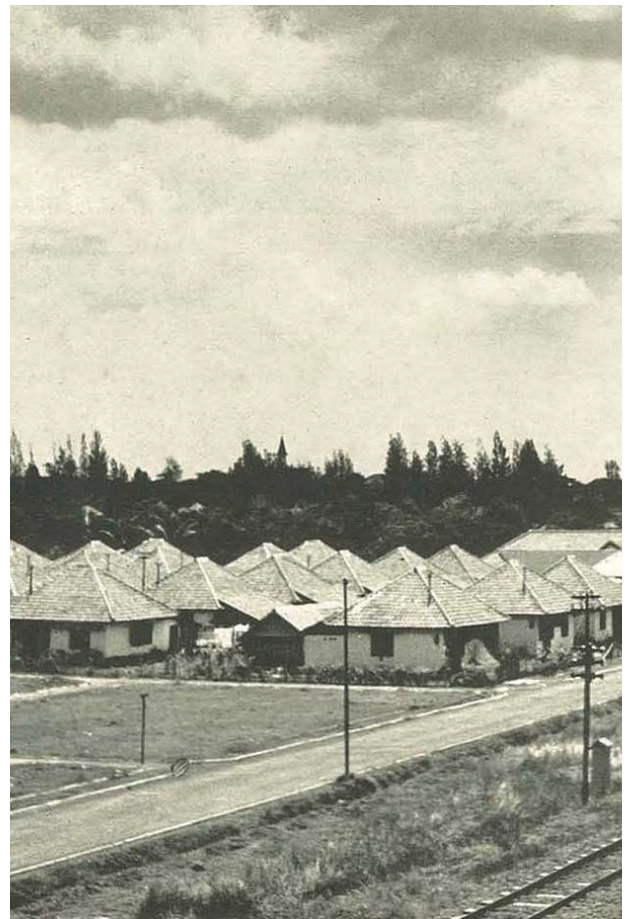
Pada 1945, penduduk Jakarta masih berjumlah 623.343 jiwa. Pada 1949, jumlahnya melonjak 1,34 juta jiwa—sekitar dua kali lipat atau 100%. Arus migrasi dari desa Jawa dan luar Jawa begitu pesat, *kenapa? Apakah yang dijanjikan Jakarta dalam waktu tiga tahun itu? Dan apakah Jakarta siap menampung arus migrasi tersebut?* Di titik inilah, watak pertumbuhan Jakarta sebagai *sprawling city* (kota yang menjalar, tanpa rencana atau cetak biru) terpancang kuat.

Dinamisnya Arus Pertumbuhan Jakarta

Memang ada upaya untuk membangun kota lebih teratur saat itu—mengacu pada model kota-kota Eropa yang pernah diterapkan di area Kota Lama hingga Kali Besar pada abad ke-17, dan area Koningsplein di abad ke-19, kini dikenal sebagai wilayah Monas dan Istana Merdeka. Pada 1948, dalam rapat Panitia Perumahan Pusat, diajukan rencana pembangunan kota baru. Daerahnya: Kebayoran. Tindak lanjutnya: mulai 1 Desember 1948 proses pembayaran ganti rugi kepada penduduk, 700 ribu pohon yang terdiri 26 macam pohon buah harus diganti, 1668 bangunan rumah, kios, dan kandang-kandang ternak harus digusur. Ganti rugi total sejumlah 15 juta gulden telah dibayarkan pada penduduk di Januari 1949.

Tapi, walau pembangunan Kebayoran berhasil dilaksanakan, konsep “kota baru” itu tidak bisa mengimbangi arus migrasi dan penambahan penduduk. Kota Jakarta semakin menjalar, tata ruang semakin cair. Pada 1953, penduduk Jakarta meningkat menjadi 1,8 jutaan jiwa. Pada 1963, menjadi 3,1 juta jiwa. Dan pada 1970, jadi 4,2 juta jiwa. Dalam periode 1950-an hingga 1960-an, tinggal di kampung kota menjadi pilihan logis. Watak cair dan semi-permanen (rumah *ngontrak*, kios-kios, warung-warung bilik, dan gerobak yang mudah dibongkar atau bergerak)

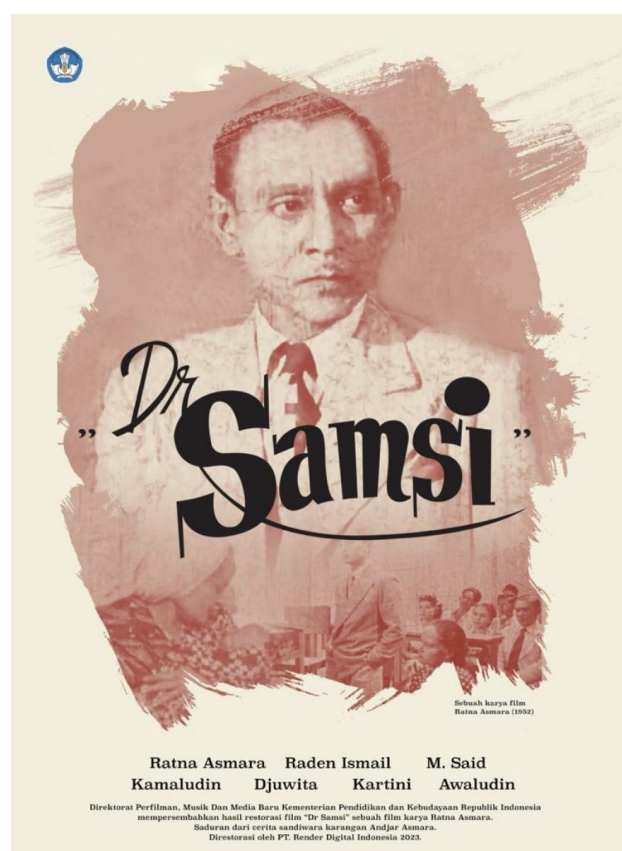
bisa mengakomodasi harapan untuk hidup lebih baik, lebih menetap, lebih mapan, suatu saat nanti, asalkan mampu bertahan dalam suasana antara yang cair itu.



Source: PICRYL

Imaji kampung kota Jakarta pada film, sketsa dan lukisan, juga foto-foto, pada 1950-an

belum tampak semrawut oleh gang dan bangunan-bangunan kecil yang saling rapat. Sebab, pada masa itu, kampung-kampung di wilayah Jakarta masih banyak berada di area rural: perkebunan atau hutan-hutan kota, tanah luas, jalan tanah. Karakter kampung di Jakarta dalam film seperti *Dr. Samsi* (Ratna Asmara, 1952), misalnya, telah menggambarkan kesenjangan ekonomi tapi juga tidak bertentangan secara frontal. Tokoh utama bisa bergerak leluasa dari kehidupan jelata di kampung ke ruang-ruang dengan arsitektur modern berdinding semen dan halaman resik.



Source: Kemendikbudristek

Pada 1969, Usmar Ismail mempertentangkan dengan keras kata “kampung” (“*village*”) dalam film *Big Village*. Film satire ini berisikan kritik sosial yang keras dari Usmar sebagai seorang intelektual publik terhadap perilaku para elite Jakarta yang makmur tapi ia pandang kolot dan tak punya visi modern yang maju. Bagi Usmar, kemakmuran ekonomi hanyalah permukaan, tapi perilaku manusia masihlah bagai “orang desa”.

Usmar agaknya tak memiliki pandangan romantik terhadap desa atau kampung. Ia mempersoalkan pertentangan antara angan-angan modern dan kenyataan sosial masyarakat Jakarta yang ada. Pada periode itu, sebetulnya penjaran kampung kota—dan dengan demikian juga pemekaran kota Jakarta—sedang menampilkan ciri dinamis yang keras sekaligus kreatif, penuh negosiasi dan siasat.

Kemakmuran yang dibawa oleh stabilitas politik pasca-1965 dan disusul boom minyak pada 1974 yang dikerangkakan dalam sistem pertumbuhan ekonomi berwatak *cucuran ke bawah* (*trickle down effect*) membuat orang dari seluruh Indonesia berebut ke pusat, dan berjibaku sembari bertahan mendapat cucuran kemakmuran itu. Dalam konteks itu, kampung-kampung dengan tata ruang yang cair dan serba-sementara, serba bergerak, tumbuh menjadi ruang-ruang kreatif warga.

Kampung Kota Sebagai Model Pembangunan Alternatif

Semakin padat Jakarta, semakin cair gerak hidup warganya. Kampung kota menjadi wahana bertahan dalam hidup yang semakin semrawut di gang-gang dan pemukiman padat, dengan rentang kekumuhan dan kemakmuran yang beragam.

Dalam konteks ini, pendekatan antropologis-etnografis jadi menarik. Clifford Geertz, misalnya, mendefinisikan kampung kota sebagai: *Wadah penyedia tempat tinggal yang terjangkau terutama bagi kaum migran yang baru datang...sekaligus sebagai tempat komunitas sosial melakukan adaptasi dalam kehidupan urban yang memerlukan kemampuan untuk berkolaborasi dengan mereka yang berasal dari etnis dan agama lain* (Geertz, 1965).

Sebagai ruang yang cair dan selalu menjalar, kampung kota “memaksa” orang Jakarta hidup berdekatan, bergesekan, dan berkolaborasi. Konflik horizontal memang sering juga terjadi. Politik identitas sempat subur, khususnya pada 2012 hingga 2019, dan masih tampak jejaknya dalam ketegangan-ketegangan ormas agama dan etnik tertentu di Jakarta hingga kini.

Tapi, warga yang hidup dalam kampung-kam-

pung kota Jakarta akan memahami secara intuitif bahwa formasi-formasi nilai dan sosial dari politik identitas demikian hanyalah salah satu siasat saja hidup di Jakarta. Misalnya, untuk mendapat jejaring pengaman sosial ekonomi dan perasaan-perasaan bermakna menghadapi kerasnya hidup. Kecairan hidup dan kesementaraan dalam kampung-kampung kota Jakarta justru salah satu modal sosio-kultural *ketambengan* (*resilience*) warga. Sebab, kecairan dan kesementaraan itu mengisyaratkan adanya gerak.

Mobilitas tidak melulu milik para pengendara mobil pribadi kreditan di Jakarta. Warga di kampung-kampung kota Jakarta, adalah para pelintas batas yang selalu bergerak: mendesain presentasi di Canva pada gawai sembari duduk di MRT, makan lezat dan murah di warung-warung becek, bekerja dan *meeting* di kafe-kafe aneka harga, berburu buku dan *vinyl* bekas di Blok M Square, nongkrong dan cari hiburan di seantero Jabodetabek, untuk akhirnya pulang, masuk gang, tetirah di rumah petak kontrakan, sembari ketiduran mendengar tetangga berantem di balik dinding dan terbangun oleh azan *speaker* sumbang di musala ujung gang.

Kampung kota, kata Felipe Hernandez, adalah “*Permukiman informal sebagai materialisasi ruang ketiga, yaitu ruang transisi*.” (2010). Bukan hanya ruang-ruang kampung menjalar, memekarkan Jakarta, hidup dan wacana pun menjalar—semua selalu dalam keadaan transisional, selain transaksional. Bentuk-bentuk solidaritas baru terbangun, di samping selalu ada risiko-risiko dislokasi dan konflik baru. Lantas, apakah warga kampung kota betul-betul hidup tanpa rencana, sepenuhnya bersiasat untuk bertahan hidup, dan tak bisa berharap keadaan lebih baik di pemukiman informal mereka?

Dalam sebuah obrolan informal makan siang dekat Balai Kota bersama saya, penulis dan arsitek Avianti Armand sempat melontarkan hal menarik. Ia setuju, Jakarta perlu memilih model dan visi globalnya sendiri, tak sepenuhnya *manut* pada model-model kota global yang berfokus pada sasaran kekuatan finansial di kota-kota global Barat. Seiring dengan itu, kata Avianti, Jakarta mungkin tak perlu mendamba model pembangunan infrastruktur pencakar langit.

Avianti lebih percaya model perbaikan kampung kota seperti pernah dilakukan oleh Ali Sadikin pada akhir 1968 hingga awal 1970-an. Yang dilakukan Bang Ali, katanya, adalah intervensi perbaikan infrastruktur fundamental hidup di kampung kota: perbaikan jalan dan saluran pembuangan air. Ketika fundamen itu diperbaiki,

warga terpelatuk untuk memperbaiki sendiri pemukiman mereka.

Model yang demikian adalah model pembangunan yang mempercayai kreativitas warga. Pemerintah memperbaiki infrastruktur fundamental bagi hidup warga, warga lantas berkreasi memperbaiki mutu hidup mereka. Jika itu yang terjadi, kampung kota menjadi *rimpang*, bukan lagi sekadar tempat sebagai “penyimpangan” arsitektural dan ekonomi. Mungkin itu maksud Kenta Kishi, urbanis dari Jepang yang lama meneliti kampung kota di Surabaya, Jakarta, dan Bandung: Mungkin saatnya kita memandang kekacauan di kampung kota Indonesia bukan serangkai kegagalan tata ruang, tapi sebuah alternatif bagi kebuntuan urban seperti terjadi di Eropa yang rapi tapi penuh krisis eksistensial.

Dalam ilmu botani, rimpang atau rhizoma adalah *“batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan bisa menghasilkan tunas daun dan akar baru dari ruas-ruasnya.”* Akarnya bisa menyimpan zat berkhasiat, seperti pada rempah jahe dan kunyit. Bisa juga menyimpan makanan, seperti umbi-umbian. Dalam perumpamaan bagi Jakarta masa kini, kampung kota bisa merimpang. Menjadi rimpang, yang menjalar, sembari menyimpan zat-zat berkhasiat atau bahan makanan.

Kerasnya hidup di kampung kota Jakarta, mungkin akan seperti kata Efek Rumah Kaca dalam “Rimpang”:

*Dalam setiap derita kelak
Menjelma rimpang yang menyebar
Penuh ketabahan dan tak
tertahankan*

Selamat ulang tahun, Jakarta, Sang Kampung Besar!
(HD/AM)

